

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-173/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN  
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)  
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI  
KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) telah ditandatangani Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan uji coba pelaksanaan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dengan 5 Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 5 (lima) Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura sepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara penuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN.

KESATU : Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator*) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara DJBC dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, khususnya mengenai pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses *customs clearance* berupa penurunan tingkat risiko sebesar 20% pada *risk engine* reguler dalam manajemen risiko penjaluran impor.

KETIGA : Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

1. barang impor berasal dari pelabuhan muat di:
  - a. Brunei Darussalam;
  - b. Malaysia;
  - c. Thailand; atau
  - d. Singapura.
2. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (*AEO Trader Identification Number*) dan tanggal otorisasi (*authorization date*) perusahaan AEO dari negara anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam butir 1; dan
3. merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,

dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penerapan secara penuh (*mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR KEP-173/BC/2024  
TENTANG  
*PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)  
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK  
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED  
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN  
ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA  
ASEAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA  
ANGGOTA ASEAN*

KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI  
BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN  
ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN.



**ARRANGEMENT BETWEEN THE CUSTOMS  
ADMINISTRATIONS OF THE MEMBER STATES OF THE  
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS  
REGARDING THE MUTUAL RECOGNITION OF THEIR  
RESPECTIVE AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR  
PROGRAMMES**

The Customs Administrations of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) (hereinafter referred to individually as "Participant" and collectively as "Participants");

**RECALLING** Article 59 of the ASEAN Trade in Goods Agreement signed in Cha-am, Thailand on 26 February 2009 and the decisions of the customs administrations of the ASEAN Member States to implement an arrangement on the mutual recognition of the ASEAN Authorised Economic Operators (AEO) Programmes (hereinafter referred to as "this Arrangement") on a pathfinder basis in accordance with the endorsed Strategic Plan of Customs Development 07 on AEO 2021 – 2025 Phase;

**RECALLING** the Joint Action Plan on the Mutual Recognition Arrangement of Authorised Economic Operators Programme of ASEAN Member States adopted at the 31<sup>st</sup> Meeting of the ASEAN Customs Directors-General held on 7 – 9 June 2022 in Singapore which states that Participants will endeavour to conclude this Arrangement at the earliest opportunity;

**CONSIDERING** that a joint evaluation by the Participants has confirmed that their national Authorised Economic Operator Programmes (hereinafter referred to as "Programmes") are security and compliance initiatives that strengthen the security of the supply chain and enhance trade facilitation of the Participants;

**RECOGNISING** that the Programmes of the Participants apply security requirements in accordance with the respective domestic laws of the Participants and the internationally recognised security standards set forth in the World Customs Organization SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (hereinafter referred to as "SAFE Framework"); and

**ACKNOWLEDGING** the specialised nature of border management processes, procedures, mechanisms, and the legislations adopted by the Participants in administering their respective Programmes,

**HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:**

### **Section I Scope**

1. This Arrangement will exclusively concern the mutual recognition of the respective Programmes administered by the Participants that are participating in this Arrangement pursuant to paragraph 2 of Section VIII (Commencement and Implementation) (hereinafter referred to as "Participating Parties").
2. In this Arrangement, "Members" refer to the companies authorised under the respective Programmes administered by the Participating Parties.

## **Section II Compatibility**

The Participating Parties will ensure that:

- (a) the standards applied to the respective Programmes will continue to be compatible in the following aspects:
  - (i) accreditation criteria;
  - (ii) application procedures;
  - (iii) validation processes;
  - (iv) authorisation processes; and
  - (v) monitoring and evaluation mechanisms.
- (b) their respective Programmes will continue to operate in accordance with the principles and standards of the SAFE Framework.

## **Section III Mutual Recognition and Trade Facilitation Measures**

1. Each Participating Party will accept the validation and authorisation status granted to Members of the other Participating Parties' Programmes.
2. After the Participating Parties have established the compatibility of their Programmes, each Participating Party will treat Members of the other Participating Parties' Programmes in a manner comparable to those of its own Programme, and endeavour to provide the Members, to the extent practicable, with the following trade facilitation measures:

- (a) provide expedited clearance by reducing documentary checks and/or physical cargo inspection, for cargoes exported from or imported by a Member of the other Participating Parties' Programmes, subject to assessment of security alert levels;
  - (b) grant priority checks for cargoes exported from or imported by a Member of the other Participating Parties' Programmes that have been selected for physical inspection; and
  - (c) in the event of a disruption to international trade, endeavour to provide priority expedited clearance to the cargoes exported from or imported by a Member of the other Participating Parties' Programmes.
3. Each Participating Party will take into consideration the authorisation status of Members accorded by the other Participating Parties under their respective Programmes when conducting risk assessment on importing goods from those Members.
  4. Each Participating Party may, under reasonable circumstances, suspend any or all of the facilitation measures given to one or more Members of the other Participating Parties' Programmes, provided that the other Participating Parties have been promptly notified of this decision and the underlying reasons in writing (including via electronic mail), or via customs-customs electronic platform if such a platform is established.
  5. Participating Parties intend to maintain the ability to revoke membership in their respective Programme procedures. The fact of the revocation by a Participating Party of a Member whose status has been accepted by the other Participating Parties will be promptly notified to the other Participating Parties.

## **Section IV**

### **Information Exchange and Communication**

1. The Participating Parties will set up an information exchange mechanism to effectively implement the following measures:
  - (a) regularly exchanging up-to-date information on Members under their respective Programmes, including the name, address, unique identifier/AEO reference number, authorisation status, and any other relevant information through an agreed communication channel in a secure manner; and when available and as applicable, Participating Parties will exchange the agreed information in a real time manner, to the extent practicable;
  - (b) providing updates on changes to their respective Programmes, including operational and administrative procedures or changes to the name of their respective Programmes; and
  - (c) exchanging mutually agreed beneficial information, such as information and statistics relating to the usage of the Programmes by Members of the Participating Parties, the trade facilitation impact or benefits observed, or other information regarding supply chain security.
  
2. The Participating Parties:
  - (a) will each appoint a liaison officer and inform the other Participating Parties of the appointment and relevant details of the liaison officer;
  - (b) will ensure that the information exchanged under this Arrangement will be kept confidential and will be used by Participating Parties and respective

government agencies solely for the purpose of implementing this Arrangement, unless such information is already in the public domain. If any Participating Party needs to use the information for the purposes not covered in this Arrangement, or to disclose the information to a third party, the requesting Participating Party will seek prior written consent from the Participating Party who had provided the information; and

- (c) will ensure that information exchanged or disclosed under this Arrangement, is in accordance with the respective domestic laws, regulations, and policies applicable to each Participating Party.

## **Section V Future Endeavours**

The Participating Parties will:

- (a) actively implement this Arrangement with a view to strengthening supply chain security and enhancing the Participating Parties' common interests in trade facilitation;
- (b) each strive to provide Members of the other Participating Parties' Programmes with further benefits in accordance with this Arrangement;
- (c) engage in dialogues to discuss opportunities to allow trade resumption following disruption in emergency situations. Such situations include heightened security alert levels, border closures, or natural disasters;
- (d) establish channels of communication to pursue possible improvements or enhancements to this

Arrangement such as further trade facilitation measures, in accordance with the SAFE Framework and its guidelines; and

- (e) endeavour to make available an electronic system to facilitate real time information exchange and communication for the purpose of this Arrangement.

### **Section VI Consultations and Amendments**

1. All issues relating to the interpretation or implementation of this Arrangement will be resolved through mutual consultation and written consent by the Participants.
2. Amendment of this Arrangement will be subject to mutual consultation and written agreement by the Participants.
3. The Participants will review this Arrangement as necessary.

### **Section VII Status of Arrangement**

1. This Arrangement is not legally binding on the Participants and does not give rise to any rights and obligations under international law or the law of any other jurisdiction, nor does it confer or create any rights, privileges, or benefits on any third person, company or entity, private or public.
2. The Participants will implement the measures under this Arrangement in accordance with their respective domestic laws, regulations and practices, and the applicable international instruments.

3. No provision in this Arrangement will restrict any Participant from acting in accordance with its domestic laws, regulations and practices, and the applicable international instruments.
4. This Arrangement will be without prejudice to any other mutual recognition arrangement of the Programmes between the Participants.

### **Section VIII Commencement and Implementation**

1. This Arrangement will come into effect upon signature by the Participants.
2. After this Arrangement comes into effect pursuant to paragraph 1, any Participant which wishes to participate in this Arrangement upon satisfactory completion of the joint validation of its AEO programme by other Participants, will notify the ASEAN Secretariat in writing of its effective date of participation, and the ASEAN Secretariat will thereafter notify the rest of the Participants of the same.
3. Upon the submission of the notifications pursuant to paragraph 2, the first group of at least three Participating Parties will commence a pilot phase for a period of six months or as mutually agreed by the Participating Parties.
4. While the pilot phase in paragraph 3 is ongoing, the following Participating Parties will automatically join therein for the remaining period or as mutually agreed by the Participating Parties.
5. Should there be no on-going pilot phase, each of the remaining Participant will commence a pilot phase with the existing Participating Parties upon its submission of

notification pursuant to paragraph 2 for a period of time as mutually agreed.

6. The Participating Parties will finalise the implementation arrangements on operational procedures upon completion of each of the pilot phase and implement this Arrangement on a date mutually agreed by the Participating Parties.

### **Section IX Termination and Withdrawal**

1. Any of the Participants wishing to withdraw its participation under this Arrangement will submit a written notification to the ASEAN Secretariat at least 60 days prior to the date of its effective date of withdrawal. The ASEAN Secretariat will thereafter notify the rest of the Participants of such withdrawal.
2. This Arrangement may be terminated upon a written agreement of the Participants or the rest of the Participants as the case may be.
3. The commitments set out in Section IV (Information Exchange and Communication) regarding confidentiality and security of the information obtained pursuant to this Arrangement will remain in effect after the termination of this Arrangement as long as the Participants retain the information.

**SIGNED** on the Nineteenth Day of September in the Year of Two Thousand and Twenty-Three at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam; Phnom Penh, Cambodia; Jakarta, Indonesia; Vientiane, Lao PDR; Putrajaya, Malaysia; Yangon, Myanmar; Manila, Philippines; Singapore; Bangkok, Thailand; and Ha Noi, Viet Nam, in a single original copy in the English Language.

For the Royal Customs and Excise Department of Brunei Darussalam:



**ZUL-FAISAL HAJI SAHERIN**  
Acting Controller of Customs and Excise

For the General Department of Customs and Excise of Cambodia:



**Dr. KUN NHEM**  
Minister Attached to the Prime Minister  
Director General

For the Directorate General of Customs and Excise of the Republic of Indonesia:



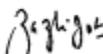
**ASKOLANI**  
Director General

For the Lao Customs Department of the Lao People's Democratic Republic:



**PHOUKHAOKHAM VANNAVONGXAY**  
Director General

For the Government of Malaysia as represented by the Royal Malaysian Customs Department of Malaysia:



**DATO' ZAZULI JOHAN**  
Director General of Customs

For the Customs Department of the Republic of the Union of Myanmar:



**THEIN SWE**  
Director General

For the government of the Republic of the Philippines as represented  
by the Philippine Bureau of Customs:



**BIENVENIDO F. RUBIO**  
Commissioner

For the Singapore Customs of the Republic of Singapore:



**TAN HUNG HOOI**  
Director General

For the Customs Department of the Kingdom of Thailand:



**PATCHARA ANUNTASILPA**  
Director General

For the Ministry of Finance as represented by General Department of  
Viet Nam Customs of the Socialist Republic of Viet Nam:



**NGUYEN VAN CAN**  
Director General

---

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik  
**ASKOLANI**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI NOMOR KEP-173/BC/2024  
TENTANG  
PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)  
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK  
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED  
ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN  
ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA  
ASEAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA  
ANGGOTA ASEAN

TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN ALUR PERTUKARAN INFORMASI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
  - a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator/AEO*) dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari pihak administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN, selanjutnya:
    - 1) Menyampaikan daftar perusahaan AEO dari administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara:
      - a) manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form daftar perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau
      - b) memutakhirkan daftar perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam hal sistem komputer pelayanan telah mengakomodasi form daftar perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya; dan/atau
    - 2) Menyampaikan informasi berupa *update* program AEO dan informasi terkait lainnya dari pihak administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan Direktur Teknis Kepabeanan;
  - b. Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update*

program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN;

- c. Memfasilitasi komunikasi antara DJBC dengan pihak administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN;
- d. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
- e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.

2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

- a. Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form daftar perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya atau mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan pemutakhiran data pada sistem komputer pelayanan;
- b. Memutakhirkan Sistem Analisis Risiko Importasi dalam rangka pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;
- c. Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan pada sistem komputer pelayanan;
- d. Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;
- e. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau
- f. Memberikan bimbingan teknis.

3. Direktur Penindakan dan Penyidikan

- a. Menerima informasi perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis; dan/atau
- b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.

4. Direktur Teknis Kepabeanan

- a. Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;
- b. Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penerapan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement*

on *Authorized Economic Operator*) dengan pihak administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN.

- c. Menyampaikan hasil evaluasi dan/atau informasi lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, *update* program AEO, dan informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
  - d. Memberikan bimbingan teknis;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    - a. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
    - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
    - a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi; dan/atau
    - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
  7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
    - a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi; dan/atau
    - b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada Direktur Teknis Kepabeanan.

---

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

